ABSTRAK

Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam transnasional yang telah mengalami berbagai macam kebijakan represif di banyak negara, namun semua itu tidak berhasil mengakhiri aktivitas politik kelompok ini. Hal ini didukung fakta bahwa gerakan HT telah berkembang hari ini ke lebih dari 50 negara dengan jutaan anggota dan pendukung. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memutuskan untuk menanggapi kelompok ini secara paksa setelah kelompok ini bebas melakukan aktivitasnya selama bertahun-tahun, termasuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Penelitian ini merupakan studi komparasi yang bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) terkait: sejarah dan cara kerja HT, berbagai tindakan negara terhadap Hizbut Tahrir dan dampaknya terhadap aktivitas politik HT, dan tanggapan HT atas hal tersebut.

Dalam melakukannya, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi terhadap aktivitas HT, wawancara dengan anggota HT, serta kajian dokumen terhadap koleksi literatur dari pemerintah, media massa dan publikasi HT.

Penelitian ini menggunakan teori-teori gerakan sosial yaitu teori struktur peluang politik (POS), mobilisasi sumber daya (RMT), pembingkaian *(framing)* dan perubahan identitas kolektif untuk menganalisis pengaruh kebijakan negara terhadap keberadaan HT dan aktivitasnya di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menemukan persamaan antara HTI dan HTM dalam sejarah, cara kerja dan kebijakan pembubarannya. Dalam sejarah dan cara kerja, konteks sejarah HTI dan HTM memiliki kesamaan yang dipengaruhi dinamika politik kedua negara. Sistem pemerintahan yang otoriter dan menekan pada era 1980-2000-an di Indonesia dan Malaysia menyebabkan HTI dan HTM harus hidup di era keterbatasan, bergerak sembunyi-sembunyi dan di bawah tanah. Cara kerja yang dikerjakan juga serupa, dengan merekrut kalangan intelektual dan memanfaatkan aktivitas diskusi intelektual, demonstrasi, dan internet untuk menyebarkan gagasan Khilafah. Hal ini karena adanya kesamaan induk organisasi, yakni berada pada satu komando Hizbut Tahrir pusat. Persamaan juga terlihat dari proses pembubaran HT di Indonesia dan Malaysia. Meskipun memiliki corak sistem demokrasi yang berbeda, pemerintahan Indonesia dan Malaysia melakukan beberapa bentuk kebijakan terhadap HT seperti mengeluarkan undang-undang luar biasa; menstigmatisasi HT sebagai kelompok anti Pancasila, anti pemerintah dan radikal; dan mengintimidasi mereka yang bergabung dengan HT dengan memberikan peringatan hukuman dan tindakan koersif.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya tanggapan atas pembubaran dari HTI dan HTM yang masif dan agresif. Mereka menggunakan instrumen hukum, politik, dan media massa untuk berusaha membatalkan pembubaran mereka. Setelah itu, HTI dan HTM melakukan perubahan strategi melalui mobilisasi sumber daya yang tersedia dan melalui perubahan identitas kolektif mereka. Strategi yang dikerjakan HTI dan HTM berfokus pada perubahan identitas kolektif melalui jaringan informal gerakan. Strategi-strategi yang dikerjakan HTI dan HTM merupakan perbedaan dalam studi ini. Karena HTM belum dibubarkan melalui kebijakan federal, maka mereka memindahkan pusat dakwah mereka ke wilayah yang belum melarangnya. Sementara, HTI sangat dominan melalui figur populer mereka melalui gerakan-gerakan keislaman dengan karakteristik kepemudaan.

Studi komparasi ini menunjukkan bahwa perubahan strategi Hizbut Tahrir di Indonesia dan Malaysia adalah untuk melanjutkan kerja-kerja politik dan ideologinya tanpa

diganggu oleh rezim dan gerakan kontra lainnya yang menentangnya. Dengan pendekatan gerakan sosial, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan negara tidak serta merta mengakhiri eksistensi suatu gerakan; melainkan dapat mencari strategi lain untuk mempertahankan perjuangan politiknya. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, kebijakan negara yang terkesan represif terbukti tidak membunuh HT, nyatanya kelompok ini masih hidup namun dengan wajah dan tempat aksi yang berbeda. Karenanya, penelitian ini berkontribusi untuk mengintegrasikan pendekatan gerakan sosial pada isu politik Islam yang telah lama dianalisis secara sempit melalui analisis keamanan dan berada jauh dari Asia Tenggara.

Kata Kunci: gerakan sosial Islam transnasional, Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Hizbut Tahrir Malaysia (HTM), Perppu Ormas, Fatwa Mufti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ABSTRACT

Hizb ut-Tahrir is a transnational Islamic political movement that has experienced various kinds of repressive policies in many countries. Still, this has not succeeded in ending the group's political activities. This is supported by the fact that the HT movement has grown to more than 40 countries with millions of members and supporters. Indonesia and Malaysia are the two countries that decided to respond to this group by force after this group was free to carry out its activities for years, including obtaining legal recognition from the state. This research is a comparative study that aims to examine the similarities and differences between Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) concerning the history and workings of HT, various state actions against Hizb ut Tahrir and their impact on HT's political activities, and HT's response to that matter.

In doing so, the authors used a qualitative method by collecting data through observations of HT activities, interviews with HT members, and document reviews of literature collections from the government, mass media, and HT publications.

This study uses social movement theories, namely political opportunity structure theory (POS), resource mobilization (RMT), framing, and changes in collective identity, to analyze the influence of state policies on the presence of HT and its activities in Indonesia and Malaysia.

This research finds similarities between HTI and HTM in history, way of working, and dissolution policies. In terms of history and practice of working, the historical context of HTI and HTM have similarities that are influenced by the political dynamics of the two countries. The authoritarian and oppressive government systems in Indonesia and Malaysia in the 1980-the 2000s caused HTI and HTM to live in an era of limitations, moving clandestinely and underground. The way of work is also similar, by recruiting intellectuals and utilizing intellectual discussion activities, demonstrations, and the internet to spread the idea of the Caliphate. This is due to the similarity of the parent organization, which is under one central Hizb ut-Tahrir command. Parallels can also be seen in the dissolution of HT in Indonesia and Malaysia. Even though they have different patterns of democratic systems, the governments of Indonesia and Malaysia carry out several forms of policies against HT, such as issuing extraordinary laws; stigmatizing HT as an anti-Pancasila, anti-government and radical group; and intimidating those who join HT with warnings of punishments and coercive measures.

In addition, the research also found a response to the massive and aggressive dissolution of HTI and HTM. They used legal instruments, politics, and the mass media to try to cancel their dissolution. After that, HTI and HTM changed their strategy by mobilizing available resources and changing their collective identity. The process undertaken by HTI and HTM focuses on changing collective identity through the movement's informal network. The strategies employed by HTI and HTM are the differences in this study. Because HTM has not been disbanded through federal policy, they have moved their missionary center to an area where it has not been banned. Meanwhile, HTI is dominant through its famous figures in Islamic movements with youth characteristics.

This comparative study shows that the change in strategy of Hizb ut-Tahrir in Indonesia and Malaysia is to continue its political and ideological work without being disturbed by the regime and other counter-movements that oppose it. Using a social movement approach, this research concludes that state policy does not necessarily end the existence of a movement; instead, it can look for other strategies to maintain its political struggle. In Indonesia and Malaysia, state policies that seem repressive have proven not to have

killed HT. This group is still alive but with a different face and place of action. Therefore, this research contributes to integrating social movement approaches to Islamic political issues, which have long been narrowly analyzed through security analysis and are far from Southeast Asia.

Keywords: transnational Islamic social movements, Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Hizbut Tahrir Malaysia (HTM), Perppu of mass organizations, Fatwa Mufti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

خلاصة

حزب التحرير هو حركة سياسية إسلامية عابرة للحدود ، عانت من أنواع مختلفة من السياسات القمعية في العديد من البلدان ، لكن كل هذا لم ينجح في إنهاء الأنشطة السياسية للجماعة. ويدعم ذلك حقيقة أن حركة حزب التحرير قد نمت اليوم إلى أكثر من 50 دولة تضم ملايين الأعضاء والمؤيدين. إندونيسيا وماليزيا هما الدولتان اللتان قررتا الرد على هذه المجموعة بالقوة بعد أن كانت هذه المجموعة حرة في القيام بأنشطتها لسنوات ، بما في ذلك الحصول على اعتراف قانوني من الدولة. هذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة تهدف إلى دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين حزب التحرير فيما يتعلق بـ: تاريخ وأعمال حزب التحرير ، وإجراءات (HTM) وحزب التحرير الماليزي (HTI) الإندونيسي الدولة المختلفة ضد حزب التحرير وتأثيرها على الأنشطة السياسية لحزب التحرير ، ورد حزب التحرير على هذه المسألة.

والمقابلات ، HT عند القيام بذلك ، استخدم المؤلفون طريقة نوعية من خلال جمع البيانات من خلال ملاحظات أنشطة HT. ومراجعة الوثائق لمجموعات الأدبيات من الحكومة ووسائل الإعلام ومنشورات ، HT مع أعضاء

وتعبئة الموارد ، (POS) تستخدم هذه الدراسة نظريات الحركة الاجتماعية ، وهي نظرية هيكل الفرصة السياسية وأنشطتها في HT والتأطير والتغييرات في الهوية الجماعية لتحليل تأثير سياسات الدولة على وجود ، (RMT) إندونيسيا وماليزيا.

في التاريخ وطريقة العمل وسياسات الحل. من حيث التاريخ وطريقة HTM و HTI يجد هذا البحث أوجه تشابه بين لهما أوجه تشابه تتأثر بالديناميات السياسية للبلدين. تسببت النظم HTM و HTI العمل ، فإن السياق التاريخي لـ في عصر من HTM و HTI الحكومية الاستبدادية والقمعية في إندونيسيا وماليزيا في 1980-2000 في أن يعيش القيود ، يتحرك سرا وتحت الأرض. كما أن طريقة العمل متشابهة ، من خلال تجنيد المثقفين والاستفادة من أنشطة النقاش الفكري والمظاهرات والإنترنت لنشر فكرة الخلافة. ويرجع ذلك إلى تشابه التنظيم الأم ، الذي يخضع لقيادة مركزية واحدة لحزب التحرير. يمكن أيضًا رؤية أوجه التشابه من حل حزب التحرير في إندونيسيا وماليزيا. على الرغم من أن لديهم أنماطًا مختلفة من الأنظمة الديمقراطية ، إلا أن حكومتي إندونيسيا وماليزيا تنفذان عدة أشكال من السياسات ضد حزب التحرير مثل إصدار قوانين استثنائية. وصم حزب التحرير باعتباره جماعة مناهضة للبانكاسيلا ومناهضة للحكومة وجماعة راديكالية ؛ وتخويف أولئك الذين ينضمون إلى حزب التحرير من خلال تحذيرات من العقوبات والتدابير القسرية.

لقد استخدموا الأدوات .HTM و HTI بالإضافة إلى ذلك ، وجد البحث أيضًا استجابة للانحلال الهائل والعنيف لـ بتغيير استراتيجيتهما من خلال HTM و HTI القانونية والسياسة ووسائل الإعلام لمحاولة إلغاء حلهم. بعد ذلك ، قام على تغيير الهوية HTM و HTI تعبئة الموارد المتاحة وتغيير هويتهم الجماعية. تركز الإستراتيجية التي يتبناها هي الاختلافات HTM و HTI الجماعية من خلال الشبكة غير الرسمية للحركة. الاستراتيجيات المستخدمة من قبل من خلال السياسة الفيدرالية ، فقد نقلوا مركزهم التبشيري إلى منطقة HTM في هذه الدراسة. نظرًا لأنه لم يتم حل لم يتم حظره فيها. وفي الوقت نفسه ، فإن حزب التحرير الوطني مهيمن للغاية من خلال شخصياته الشعبية من خلال الحركات الإسلامية ذات الخصائص الشبابية.

تظهر هذه الدراسة المقارنة أن التغيير في إستراتيجية حزب التحرير في إندونيسيا وماليزيا هو مواصلة عمله السياسي والأيديولوجي دون أن ينزعج من النظام وغيره من الحركات المضادة التي تعارضه. باستخدام نهج الحركة الاجتماعية يخلص هذا البحث إلى أن سياسة الدولة لا تنهي بالضرورة وجود الحركة ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنها البحث عن ، استراتيجيات أخرى للحفاظ على نضالها السياسي. في سياق إندونيسيا وماليزيا ، أثبتت سياسات الدولة التي تبدو قمعية أنها لم تقتل حزب التحرير. في الواقع ، لا تزال هذه المجموعة على قيد الحياة ولكن مع وجه ومكان مختلفين للعمل. لذلك ، يساهم هذا البحث في دمج مقاربات الحركات الاجتماعية في القضايا السياسية الإسلامية التي تم تحليلها بشكل ضيق من خلال التحليل الأمني منذ فترة طويلة وهي بعيدة عن جنوب شرق آسيا.

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية الإسلامية عبر الوطنية ، الخلافة الإسلامية ، حزب التحرير الإندونيسي (HTI) ، حزب التحرير الماليزي (HTM) ، الفتوى المفتي ، المنظمات الجماهيرية.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI